

Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015-2024

Riswanto Sam Tandidatu^{1✉}, Yundy Hafizrianda², Risky Novan Ngutra³

Magister Keuangan Daerah, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura selama periode 2015–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analitis berbasis data sekunder. Data penelitian diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2015–2024. Analisis data dilakukan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan untuk menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura selama periode 2015–2024 masih menghadapi berbagai tantangan. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang rendah dengan dominasi ketergantungan terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pola yang berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan pada akhir periode penelitian. Sementara itu, rasio efisiensi menunjukkan kemampuan pengelolaan anggaran yang relatif baik, meskipun terdapat peningkatan tekanan fiskal akibat pertumbuhan belanja yang lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan. Dari sisi aktivitas belanja, struktur anggaran masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan belanja modal yang bersifat produktif. Selain itu, rasio pertumbuhan PAD menunjukkan pola yang fluktuatif dan belum mencerminkan pertumbuhan fiskal yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura masih perlu memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD dan peningkatan kualitas belanja publik untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: kinerja keuangan daerah; kemandirian fiskal; Pendapatan Asli Daerah; efektivitas; efisiensi; rasio keuangan daerah.

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the Jayapura Regency Government during the period of 2015–2024. This research employs a quantitative approach using a descriptive analytical method based on secondary data. The data were obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD) of Jayapura Regency, consisting of Budget Realization Reports (Laporan Realisasi Anggaran/LRA) and Notes to Financial Statements (Catatan atas Laporan Keuangan/CaLK) for the period 2015–2024. Data analysis was conducted using regional financial performance ratios, including financial independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, expenditure activity ratio, and growth ratio to assess the condition of regional financial management. The results indicate that the financial performance of the Jayapura Regency Government during the 2015–2024 period still faces several challenges. The regional financial independence ratio reveals a low level of fiscal independence, characterized by a high dependence on central government transfers. The effectiveness ratio of Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) shows a fluctuating pattern and tends to decline at the end of the observation period. Meanwhile, the efficiency ratio indicates relatively good budget management performance, although increasing fiscal pressure is observed due to expenditure growth exceeding revenue growth. In terms of expenditure activities, the budget structure remains dominated by operational expenditure rather than productive capital expenditure. Furthermore, the PAD growth ratio demonstrates a fluctuating pattern and has not yet reflected sustainable fiscal growth. Overall, the findings suggest that the Jayapura Regency Government needs to strengthen regional fiscal capacity through PAD optimization and improvement of public expenditure quality to achieve more sustainable regional financial independence.

Keywords: *regional financial performance; fiscal independence; Local Own-Source Revenue; effectiveness; efficiency; financial ratios.*

Copyright (c) 2026 Riswanto Sam Tandidatu

✉ Corresponding author :

Email Address : riswanto.zoomlion49@gmail.com

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan bagian penting dari reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia karena memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, menentukan prioritas belanja, dan menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Setelah lebih dari dua dekade diterapkan, desentralisasi telah memperluas peran pemerintah daerah dalam pembangunan, tetapi hasilnya belum sepenuhnya merata. Perbedaan kapasitas kelembagaan, basis ekonomi, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kualitas pengelolaan anggaran menyebabkan kemampuan fiskal antardaerah berkembang secara tidak seimbang. Talitha et al. (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi di Indonesia menghasilkan perkembangan wilayah yang beragam, sedangkan Lewis (2023) menegaskan bahwa pembaruan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah masih menghadapi persoalan ketimpangan fiskal, kualitas belanja, serta insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatannya sendiri.

Dalam kerangka tersebut, kemandirian fiskal menjadi salah satu prasyarat penting bagi keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki kapasitas PAD memadai akan lebih leluasa menentukan program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal. Sebaliknya, ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat dapat mempersempit ruang fiskal dan membuat keberlanjutan program daerah rentan terhadap perubahan kebijakan transfer. Meskipun Dana Alokasi Umum dan berbagai bentuk transfer antarpemerintahan dirancang untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal, disparitas fiskal antardaerah di Indonesia masih relatif tinggi. Akita et al. (2021) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berperan dalam pemerataan penerimaan fiskal, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan ketimpangan pendapatan antardaerah.

Hubungan antara transfer pemerintah pusat dan upaya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan sendiri juga tidak bersifat sederhana. Transfer fiskal dapat menimbulkan ketergantungan apabila pemerintah daerah menjadikannya sebagai pengganti upaya penggalan PAD. Akan tetapi, transfer yang dirancang dan dikelola secara tepat juga dapat memperkuat kapasitas administrasi, meningkatkan pelayanan, dan mendorong penerimaan pajak daerah. Lewis dan Smoke (2017) menjelaskan bahwa sistem transfer antarpemerintahan di Indonesia menghasilkan berbagai insentif fiskal yang memengaruhi perilaku belanja dan penerimaan pemerintah daerah. Temuan yang lebih baru dari Saptono dan Mahmud (2023) menunjukkan bahwa transfer secara agregat dan Dana Alokasi Umum dapat memberikan efek *crowding-in* terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus tidak selalu signifikan. Oleh karena itu, besarnya dana transfer belum cukup untuk menilai kesehatan fiskal daerah tanpa melihat kemampuan daerah merealisasikan PAD dan mengelola belanja secara efisien.

Kinerja keuangan daerah pada dasarnya memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengubah sumber daya fiskal menjadi program dan pelayanan publik yang efektif. Penilaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan besarnya pendapatan dan belanja, tetapi juga mencakup tingkat kemandirian, ketepatan pencapaian target pendapatan, efisiensi penggunaan anggaran, komposisi pengeluaran, dan keberlanjutan pertumbuhan penerimaan. Kajian mengenai Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah tidak selalu menghasilkan peningkatan pelayanan secara proporsional. Lewis (2017) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur hingga tingkat tertentu, tetapi tambahan belanja yang

terlalu besar tidak otomatis menghasilkan perbaikan pelayanan yang setara. Temuan tersebut diperkuat oleh Sugiyarto et al. (2025), yang menunjukkan pentingnya efisiensi dan produktivitas pengeluaran publik, khususnya pada kabupaten yang secara ekonomi masih tertinggal.

Urgensi evaluasi kinerja keuangan menjadi semakin kuat dalam konteks Papua, yang menerapkan desentralisasi asimetris melalui kebijakan otonomi khusus. Dana Otonomi Khusus diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal, mempercepat pembangunan, dan mengurangi keteringgalan pelayanan publik. Namun, bukti empiris memperlihatkan bahwa peningkatan sumber daya fiskal tidak selalu langsung menghasilkan perbaikan kesejahteraan. Cahyaningsih dan Fitradhy (2019) menemukan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal asimetris di Papua belum memberikan perbaikan yang diharapkan terhadap indikator pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, Rahman (2024) menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus memiliki pengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Aceh, Papua, dan Papua Barat. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa dampak transfer khusus sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan pendapatan, menentukan prioritas pengeluaran, dan mengendalikan pelaksanaan anggaran.

Kabupaten Jayapura merupakan salah satu daerah yang memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua. Karakteristik geografis yang luas, persebaran penduduk, keterbatasan konektivitas, serta besarnya kebutuhan pelayanan dasar menimbulkan tekanan yang tinggi terhadap anggaran daerah. Pada saat yang sama, struktur pendapatan Kabupaten Jayapura masih menunjukkan dominasi penerimaan transfer dibandingkan PAD. Berdasarkan data keuangan yang menjadi dasar penelitian, pada 2024 realisasi PAD tercatat sekitar Rp118,94 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai sekitar Rp1,37 triliun. Kondisi tersebut menghasilkan rasio kemandirian sebesar 8,68%, yang menunjukkan bahwa kemampuan daerah membiayai kebutuhan pemerintahannya melalui pendapatan sendiri masih terbatas. Pada tahun yang sama, efektivitas penerimaan PAD tercatat sebesar 61,81%, sementara komposisi belanja terdiri atas sekitar 74,01% belanja operasi dan 12,65% belanja modal. Struktur tersebut mengindikasikan adanya persoalan terkait ketergantungan fiskal, pencapaian target PAD, dan ruang anggaran bagi pengeluaran yang bersifat produktif.

Perkembangan keuangan Kabupaten Jayapura selama 2015–2024 juga berlangsung dalam lingkungan fiskal yang dinamis. Periode tersebut mencakup kondisi sebelum pandemi COVID-19, tekanan fiskal dan perubahan prioritas anggaran selama pandemi, tahap pemulihan ekonomi, serta perubahan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah dan penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua. Dinamika tersebut dapat memengaruhi penerimaan PAD, jumlah transfer, realisasi belanja, dan arah alokasi anggaran. Dengan demikian, evaluasi yang hanya menggunakan data satu atau dua tahun belum cukup untuk menggambarkan daya tahan dan konsistensi kinerja keuangan Kabupaten Jayapura. Analisis dalam rentang sepuluh tahun diperlukan untuk mengidentifikasi pola, perubahan, dan kemungkinan persoalan struktural yang tidak terlihat melalui pengamatan jangka pendek.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas desentralisasi fiskal, transfer antarpemerintahan, ketimpangan fiskal, kualitas pengeluaran publik, serta pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap pembangunan. Sofilda et al. (2023), misalnya, mengkaji hubungan desentralisasi fiskal, pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi pada ratusan kabupaten/kota di Indonesia. Studi Akita et al. (2021) memusatkan perhatian pada fungsi pemerataan Dana Alokasi Umum, sedangkan Saptono dan Mahmud (2023) menelaah pengaruh transfer terhadap penerimaan pajak daerah. Pada konteks Papua, penelitian terdahulu lebih banyak mengevaluasi pengaruh otonomi khusus terhadap indikator makroekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kajian-kajian tersebut memberikan dasar empiris penting, tetapi belum banyak menjelaskan bagaimana kinerja keuangan suatu pemerintah kabupaten di Papua berkembang secara longitudinal berdasarkan keterkaitan antara

kemampuan pendapatan, realisasi target, efisiensi anggaran, struktur belanja, dan pertumbuhan fiskalnya.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura selama sepuluh tahun secara terpadu melalui rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan, aktivitas belanja, dan pertumbuhan PAD. Kebaruan penelitian tidak hanya terletak pada objek Kabupaten Jayapura yang memiliki karakteristik desentralisasi asimetris, tetapi juga pada penggunaan periode 2015–2024 yang memungkinkan analisis dilakukan pada fase sebelum pandemi, masa pandemi, pemulihan ekonomi, dan perubahan kebijakan fiskal setelah 2021. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperlihatkan apakah peningkatan kapasitas fiskal dan dukungan transfer telah diikuti oleh perbaikan kemandirian, pencapaian PAD, efisiensi, dan orientasi belanja pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura tahun 2015–2024 berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi empiris terhadap literatur keuangan daerah, khususnya mengenai pengelolaan fiskal pada daerah penerima Dana Otonomi Khusus, sekaligus menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun target PAD yang lebih realistis, memperbaiki kualitas belanja, meningkatkan alokasi pengeluaran produktif, dan memperkuat kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Berbeda dengan sektor privat yang berorientasi pada keuntungan, evaluasi kinerja keuangan sektor publik lebih menekankan pada aspek efektivitas program, efisiensi penggunaan anggaran, transparansi, serta akuntabilitas kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018; Bovaird & Löffler, 2015).

Dalam perspektif *public financial management*, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dilihat dari besarnya pendapatan dan belanja, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu mengalokasikan sumber daya publik untuk menghasilkan manfaat sosial yang optimal. Prinsip *value for money* yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas menjadi dasar penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan pemerintah (Schick, 1998; Andrews & Entwistle, 2014).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan dan menentukan prioritas belanja sesuai kebutuhan daerah. Namun, kewenangan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, rendahnya kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta belum optimalnya kualitas belanja publik (Lewis, 2023). Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi fiskalnya secara mandiri dan efektif (Akita et al., 2021).

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah melalui informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pendekatan ini memberikan gambaran mengenai kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan, mengendalikan belanja, serta mengelola sumber daya fiskal secara berkelanjutan (Bisogno et al., 2019).

Menurut Kurniawan dan Setiawan (2021), penggunaan rasio keuangan pada sektor publik memungkinkan pemerintah dan masyarakat menilai tingkat keberhasilan pengelolaan

anggaran secara lebih objektif. Rasio keuangan juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk melihat kesesuaian antara target yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai.

Dalam penelitian mengenai pemerintah daerah, beberapa indikator yang umum digunakan untuk mengukur kinerja keuangan meliputi rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas belanja, dan pertumbuhan keuangan. Kelima indikator tersebut mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas fiskal dan kualitas pengelolaan anggaran daerah (Mahmudi, 2019; Mardiasmo, 2018).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahan melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingginya rasio kemandirian menunjukkan bahwa daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

Dalam perspektif desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan menjadi salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Daerah dengan kapasitas pendapatan sendiri yang kuat cenderung memiliki fleksibilitas fiskal yang lebih tinggi dalam menghadapi perubahan ekonomi maupun kebijakan pemerintah pusat (Smoke, 2015).

Namun demikian, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi persoalan ketergantungan fiskal. Lewis dan Smoke (2017) menjelaskan bahwa sistem transfer pemerintah pusat masih menjadi sumber pembiayaan utama bagi banyak daerah sehingga dapat mengurangi dorongan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal tidak hanya bergantung pada jumlah PAD, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Rasio ini menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan penerimaan berdasarkan perencanaan fiskal yang telah dibuat.

Dalam manajemen publik, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan jumlah penerimaan yang diperoleh, tetapi juga kemampuan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah dikatakan efektif apabila mampu mencapai target pendapatan secara optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik (Mardiasmo, 2018).

Penelitian Lewis (2017) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah harus disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, efektivitas pendapatan menjadi indikator penting karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber penerimaan secara produktif dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menggunakan sumber daya keuangan secara optimal untuk menghasilkan pelayanan publik dan pembangunan. Rasio ini menggambarkan hubungan antara jumlah belanja yang dikeluarkan dengan pendapatan yang berhasil diperoleh pemerintah daerah.

Konsep efisiensi dalam sektor publik berkaitan dengan prinsip *value for money*, yaitu bagaimana pemerintah menghasilkan manfaat terbesar dengan sumber daya yang tersedia. Andrews dan Entwistle (2014) menjelaskan bahwa efisiensi organisasi publik tidak hanya berkaitan dengan pengurangan biaya, tetapi juga kemampuan menghasilkan pelayanan yang lebih baik melalui pengelolaan sumber daya yang tepat.

Dalam konteks pemerintah daerah Indonesia, peningkatan belanja belum selalu menghasilkan peningkatan kualitas pembangunan. Lewis (2017) menemukan bahwa tambahan sumber daya fiskal dapat memberikan dampak terbatas apabila tidak didukung oleh perencanaan anggaran, pengawasan, dan kapasitas administrasi yang memadai.

Rasio Aktivitas Belanja Daerah

Rasio aktivitas digunakan untuk mengetahui pola distribusi belanja pemerintah daerah, terutama perbandingan antara belanja operasi dan belanja modal. Struktur belanja menjadi aspek penting karena menunjukkan orientasi kebijakan fiskal pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.

Dominasi belanja operasi dapat menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk kebutuhan rutin pemerintahan, sementara ruang fiskal untuk investasi pembangunan menjadi lebih terbatas. Sebaliknya, peningkatan belanja modal menunjukkan orientasi pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat (Mahmudi, 2019).

Menurut Sugiyarto et al. (2025), kualitas pengeluaran publik memiliki hubungan penting dengan keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah daerah yang mampu mengarahkan belanja pada sektor produktif memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio pertumbuhan digunakan untuk melihat perkembangan kemampuan keuangan daerah dari waktu ke waktu. Indikator ini menunjukkan apakah terjadi peningkatan atau penurunan pada pendapatan, belanja, maupun komponen keuangan lainnya.

Pertumbuhan keuangan yang positif mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal daerah, sedangkan pertumbuhan negatif menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan pendapatan maupun belanja. Oleh karena itu, analisis pertumbuhan penting dilakukan karena mampu menggambarkan keberlanjutan kinerja keuangan daerah dalam jangka panjang.

Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan fiskal daerah masih menghadapi tantangan karena sebagian pemerintah daerah memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer. Akita et al. (2021) menyatakan bahwa meskipun transfer fiskal membantu mengurangi kesenjangan antarwilayah, peningkatan kapasitas pendapatan lokal tetap menjadi faktor penting dalam memperkuat keberlanjutan fiskal daerah.

Penelitian Terdahulu dan Research Gap

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan. Irnawati et al. (2023) menunjukkan bahwa beberapa pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan rendahnya kemandirian fiskal meskipun tingkat efektivitas pendapatan relatif meningkat. Temuan serupa dikemukakan oleh Vianita et al. (2024) yang menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih menjadi karakteristik utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Rahmadani (2023) dan Tumija et al. (2022) juga menemukan bahwa variasi kinerja keuangan daerah terlihat pada aspek efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan struktur belanja. Hasil tersebut menunjukkan bahwa karakteristik ekonomi, geografis, dan kelembagaan daerah memiliki pengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan.

Meskipun penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting, sebagian besar kajian masih menggunakan periode pengamatan relatif pendek dan belum banyak mengkaji daerah dengan karakteristik desentralisasi asimetris seperti Papua. Selain itu, penelitian yang menganalisis periode panjang yang mencakup masa sebelum pandemi, pandemi COVID-19, dan pemulihan ekonomi masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura tahun 2015–2024 dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai kemampuan

daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja melalui indikator kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan keuangan daerah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analitis berbasis data sekunder. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja keuangan daerah dalam bentuk angka yang kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran kondisi fiskal pemerintah daerah (Creswell & Creswell, 2023). Data sekunder dipilih karena penelitian memanfaatkan dokumen keuangan yang telah tersedia dan dipublikasikan oleh instansi pemerintah, sehingga memungkinkan analisis terhadap perkembangan keuangan daerah dalam periode waktu tertentu (Saunders et al., 2019).

Objek penelitian adalah kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura selama periode 2015-2024. Data yang digunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan dokumen keuangan daerah yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura. Periode sepuluh tahun dipilih untuk menggambarkan dinamika pengelolaan keuangan daerah sebelum, selama, dan setelah periode pandemi COVID-19.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan melakukan telaah terhadap dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan atau dokumen yang telah tersedia dan relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022).

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Jayapura tahun 2015-2024.
2. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Jayapura.
3. Dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan pengelolaan APBD Kabupaten Jayapura.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis rasio keuangan daerah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, serta kapasitas fiskal daerah berdasarkan informasi dalam laporan keuangan pemerintah (Bisogno et al., 2019).

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura dianalisis melalui lima indikator utama, yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan secara mandiri (Smoke, 2015).

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah

Rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Rasio ini menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan sesuai dengan perencanaan fiskal.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Semakin mendekati atau melebihi target menunjukkan semakin efektif pengelolaan pendapatan daerah (Mardiasmo, 2018).

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan penggunaan anggaran dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Nilai rasio yang semakin rendah menunjukkan pengelolaan anggaran yang semakin efisien karena pemerintah mampu menghasilkan pelayanan dengan penggunaan sumber daya yang lebih optimal (Andrews & Entwistle, 2014).

4. Rasio Aktivitas Belanja Daerah

Rasio aktivitas digunakan untuk melihat pola alokasi belanja pemerintah daerah, terutama keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal. Rasio ini menggambarkan orientasi kebijakan fiskal pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya publik.

Rasio belanja operasi:

$$\text{Rasio Aktivitas Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Rasio belanja modal:

$$\text{Rasio Aktivitas Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Proporsi belanja modal yang lebih besar menunjukkan orientasi pemerintah daerah terhadap investasi pembangunan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat (Sugiyarto et al., 2025).

5. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio pertumbuhan digunakan untuk melihat perkembangan kemampuan keuangan daerah dari tahun ke tahun, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

X_t = nilai keuangan tahun berjalan.

X_{t-1} = nilai keuangan tahun sebelumnya.

Analisis pertumbuhan digunakan untuk mengetahui tren peningkatan atau penurunan kinerja fiskal pemerintah daerah selama periode penelitian (Akita et al., 2021).

Interpretasi Hasil Analisis

Hasil perhitungan masing-masing rasio kemudian dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan nilai rasio antarperiode untuk mengidentifikasi pola perkembangan kinerja keuangan Kabupaten Jayapura tahun 2015–2024. Interpretasi dilakukan dengan mengacu pada standar penilaian kinerja keuangan daerah yang digunakan dalam literatur pengelolaan keuangan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Kinerja Keuangan Kabupaten Jayapura Tahun 2015–2024

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura selama periode 2015–2024 berdasarkan laporan keuangan daerah, khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Analisis dilakukan menggunakan lima indikator utama, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan, rasio efisiensi keuangan, rasio aktivitas belanja, dan rasio pertumbuhan pendapatan.

Penggunaan beberapa indikator tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan, mengendalikan belanja, serta menjaga keberlanjutan kondisi fiskal daerah. Hasil analisis menunjukkan adanya variasi kinerja keuangan Kabupaten Jayapura selama periode penelitian, baik dari sisi kemampuan meningkatkan PAD maupun pola pengalokasian belanja daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan transfer. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan Kabupaten Jayapura periode 2015–2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015–2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Kategori
2015	74.130.385.459	110.879.199.000	66,86	Partisipatif
2016	87.394.171.937	1.287.330.504.915	6,79	Instruktif
2017	96.961.324.537	1.129.822.640.907	8,58	Instruktif
2018	88.771.869.296	202.938.677.429	43,74	Konsultatif
2019	103.441.918.382	1.148.010.624.719	9,01	Instruktif
2020	96.819.236.452	1.080.442.763.039	8,96	Instruktif
2021	125.487.074.208	1.074.555.971.251	11,68	Instruktif
2022	168.423.810.489	1.207.158.967.013	13,95	Instruktif
2023	140.312.585.756	1.298.329.210.681	10,81	Instruktif
2024	118.938.116.142	1.370.076.089.806	8,68	Instruktif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jayapura (2025)

Berdasarkan Tabel 1, rasio kemandirian keuangan Kabupaten Jayapura menunjukkan pola yang berfluktuasi selama periode penelitian. Nilai rasio tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 66,86%, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 6,79%.

Setelah tahun 2015, tingkat kemandirian mengalami penurunan yang cukup besar dan sebagian besar periode penelitian berada pada kategori instruktif. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penerimaan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dibandingkan kemampuan menghasilkan PAD secara mandiri.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan dalam APBD. Rasio ini menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan yang telah direncanakan.

Hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Kabupaten Jayapura tahun 2015–2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Jayapura Tahun 2015–2024

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kategori
-------	-----------------	--------------------	-----------------------	----------

2015	76.901.687.650	74.130.385.459	96,40	Efektif
2016	84.316.762.612	87.394.171.937	103,65	Sangat Efektif
2017	101.749.224.700	96.961.324.537	95,29	Efektif
2018	104.549.334.750	88.771.869.296	84,91	Cukup Efektif
2019	132.520.012.576	103.441.918.382	78,06	Kurang Efektif
2020	132.247.482.823	96.819.236.452	73,21	Kurang Efektif
2021	160.086.311.056	125.487.074.208	78,39	Kurang Efektif
2022	190.688.060.209	168.423.810.489	88,32	Cukup Efektif
2023	178.135.573.057	140.312.585.756	78,77	Kurang Efektif
2024	192.440.499.914	118.938.116.142	61,81	Kurang Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jayapura (2025)

Berdasarkan Tabel 2, efektivitas PAD Kabupaten Jayapura mengalami perubahan selama periode penelitian. Nilai efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 103,65%, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 61,81%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target PAD belum stabil. Setelah mengalami kondisi sangat efektif pada tahun 2016, tingkat efektivitas mengalami kecenderungan penurunan hingga akhir periode penelitian.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Indikator ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengendalikan penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.

Dalam penelitian ini, rasio efisiensi dihitung dengan membandingkan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan daerah Kabupaten Jayapura selama periode 2015–2024. Hasil perhitungan rasio efisiensi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rasio Efisiensi Keuangan Kabupaten Jayapura Tahun 2015–2024

Tahun	Realisasi Daerah (Rp)	Belanja Realisasi Daerah (Rp)	Pendapatan	Rasio Efisiensi (%)	Kategori
2015	1.041.095.892.946	1.142.988.945.875		91,09	Efisien
2016	1.277.671.317.569	1.374.724.676.852		92,94	Efisien
2017	1.034.589.321.296	1.310.482.165.443		78,95	Efisien
2018	1.050.376.445.890	1.358.428.011.203		77,33	Efisien
2019	1.153.421.163.601	1.403.917.734.612		82,16	Efisien
2020	1.078.406.055.964	1.354.329.918.730		79,62	Efisien
2021	1.306.854.054.411	1.424.965.193.821		91,71	Efisien
2022	1.456.501.945.138	1.583.412.777.502		91,99	Efisien
2023	1.456.647.393.277	1.610.993.822.541		90,42	Efisien
2024	1.515.427.984.455	1.607.230.998.921		94,29	Kurang Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jayapura (2025)

Berdasarkan Tabel 3, rasio efisiensi keuangan Kabupaten Jayapura selama periode 2015–2024 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan sebagian besar berada pada kategori efisien. Nilai rasio terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 77,33%, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 94,29%.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa selama periode penelitian pemerintah daerah masih mampu menjaga keseimbangan antara realisasi belanja dan pendapatan daerah. Namun, peningkatan rasio efisiensi pada tahun-tahun terakhir menunjukkan adanya tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah karena pertumbuhan belanja relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan.

Rasio Aktivitas Belanja Daerah

Rasio aktivitas digunakan untuk melihat pola pengalokasian anggaran pemerintah daerah, terutama perbandingan antara belanja operasi dan belanja modal. Analisis ini penting untuk mengetahui orientasi kebijakan fiskal pemerintah daerah apakah lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan rutin pemerintahan atau investasi pembangunan.

Rasio Aktivitas Belanja Operasi

Hasil perhitungan proporsi belanja operasi Kabupaten Jayapura tahun 2015–2024 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rasio Aktivitas Belanja Operasi Kabupaten Jayapura Tahun 2015–2024

Tahun	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2015	756.231.526.921	1.041.095.892.946	72,65
2016	870.620.832.472	1.277.671.317.569	68,15
2017	856.182.330.654	1.034.589.321.296	82,79
2018	883.273.658.642	1.050.376.445.890	84,11
2019	865.756.437.929	1.153.421.163.601	75,08
2020	774.339.754.826	1.078.406.055.964	71,82
2021	858.609.215.238	1.306.854.054.411	65,72
2022	938.834.763.258	1.456.501.945.138	64,46
2023	961.674.238.371	1.456.647.393.277	66,01
2024	1.121.584.892.147	1.515.427.984.455	74,01

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jayapura (2025)

Berdasarkan Tabel 4, belanja operasi masih menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja daerah Kabupaten Jayapura. Proporsi belanja operasi berada pada rentang 64,46% hingga 84,11%.

Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 84,11%, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 64,46%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintahan.

Rasio Aktivitas Belanja Modal

Selain belanja operasi, analisis juga dilakukan terhadap proporsi belanja modal sebagai indikator investasi pembangunan daerah.

Tabel 5. Rasio Aktivitas Belanja Modal Kabupaten Jayapura Tahun 2015–2024

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2015	280.047.835.124	1.041.095.892.946	26,91
2016	403.961.480.778	1.277.671.317.569	31,62
2017	171.196.904.022	1.034.589.321.296	16,55
2018	162.308.021.748	1.050.376.445.890	15,45
2019	256.653.094.452	1.153.421.163.601	22,25
2020	255.533.862.354	1.078.406.055.964	23,70
2021	251.106.834.927	1.306.854.054.411	19,22
2022	313.318.762.921	1.456.501.945.138	21,51
2023	292.757.204.906	1.456.647.393.277	20,10
2024	191.543.092.308	1.515.427.984.455	12,65

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jayapura (2025)

Berdasarkan Tabel 5, proporsi belanja modal Kabupaten Jayapura mengalami penurunan pada akhir periode penelitian. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 31,62%, sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 12,65%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan melalui belanja modal masih terbatas dibandingkan kebutuhan belanja rutin pemerintah daerah.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Rasio pertumbuhan digunakan untuk melihat perkembangan kemampuan keuangan daerah dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, pertumbuhan dianalisis berdasarkan perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura selama periode 2015–2024.

Hasil perhitungan pertumbuhan PAD disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Pertumbuhan PAD Kabupaten Jayapura Tahun 2015–2024

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan PAD (%)	Kategori
2015	74.130.385.459	-4,00	Menurun
2016	87.394.171.937	17,86	Meningkat
2017	96.961.324.537	10,95	Meningkat
2018	88.771.869.296	-8,45	Menurun
2019	103.441.918.382	16,52	Meningkat
2020	96.819.236.452	-6,40	Menurun
2021	125.487.074.208	29,61	Meningkat
2022	168.423.810.489	34,22	Meningkat
2023	140.312.585.756	-16,69	Menurun
2024	118.938.116.142	-15,25	Menurun

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jayapura (2025)

Berdasarkan Tabel 6, pertumbuhan PAD Kabupaten Jayapura menunjukkan pola yang berfluktuasi selama periode penelitian. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 34,22%, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2023 sebesar -16,69%.

Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum berlangsung secara konsisten. Setelah mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021 dan 2022, PAD kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024.

Kemandirian Fiskal Kabupaten Jayapura dalam Perspektif Desentralisasi Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Jayapura selama periode 2015–2024 masih berada pada tingkat rendah, yang ditunjukkan oleh dominasi kategori instruktif pada sebagian besar tahun pengamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas, sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih menjadi sumber utama pembiayaan daerah.

Rendahnya tingkat kemandirian fiskal tidak hanya menunjukkan keterbatasan kemampuan menghasilkan pendapatan lokal, tetapi juga menggambarkan tantangan struktural dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Secara konseptual, desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Namun, kewenangan tersebut akan sulit menghasilkan kemandirian apabila tidak didukung oleh kapasitas ekonomi daerah, basis pajak yang kuat, serta kemampuan administrasi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber penerimaan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Lewis dan Smoke (2017) yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia masih mengalami ketergantungan tinggi terhadap transfer antarpemerintah meskipun telah memperoleh kewenangan fiskal yang lebih besar melalui desentralisasi. Menurut penelitian tersebut, sistem transfer memang mampu menjaga keberlangsungan pelayanan publik daerah, tetapi pada saat yang sama dapat mengurangi insentif pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pendapatan lokal.

Hasil penelitian Akita et al. (2021) juga memperkuat temuan tersebut. Mereka menemukan bahwa mekanisme transfer fiskal di Indonesia memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah, tetapi belum sepenuhnya mampu

mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, tingginya ketergantungan Kabupaten Jayapura terhadap transfer pemerintah pusat merupakan bagian dari persoalan yang lebih luas dalam tata kelola fiskal daerah di Indonesia.

Dalam konteks Kabupaten Jayapura, kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena karakteristik wilayah Papua memiliki tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan struktur ekonomi lokal yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan PAD tidak cukup hanya dilakukan melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, tetapi juga membutuhkan strategi pembangunan ekonomi lokal yang mampu memperluas basis penerimaan daerah.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Jayapura perlu memperkuat strategi peningkatan kapasitas fiskal melalui pengembangan sektor ekonomi potensial daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan kualitas administrasi perpajakan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan. Dengan demikian, transfer pemerintah pusat dapat berfungsi sebagai instrumen percepatan pembangunan, bukan sebagai sumber pembiayaan utama yang bersifat permanen.

Efektivitas PAD dan Tantangan Optimalisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas PAD Kabupaten Jayapura mengalami fluktuasi dan menunjukkan kecenderungan penurunan setelah tahun 2016. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan belum berjalan secara konsisten. Meskipun pada beberapa periode realisasi PAD mampu mendekati atau melampaui target, namun pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan yang cukup signifikan.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan target pendapatan dengan kemampuan aktual pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan dan pengelolaan sumber penerimaan. Penetapan target PAD yang terlalu optimistis tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal dapat menyebabkan rendahnya tingkat efektivitas penerimaan. Sebaliknya, target yang realistis dan berbasis pada potensi ekonomi daerah akan meningkatkan akurasi perencanaan fiskal.

Temuan ini mendukung penelitian Lewis (2017) yang menyatakan bahwa peningkatan sumber daya fiskal daerah tidak selalu menghasilkan peningkatan kapasitas pelayanan maupun penerimaan lokal apabila tidak didukung oleh kualitas institusi pemerintah daerah. Faktor kelembagaan seperti kapasitas aparatur, sistem administrasi pendapatan, dan efektivitas pengawasan menjadi elemen penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan PAD.

Selain itu, Smoke (2015) menjelaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya bergantung pada pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah, tetapi juga pada kemampuan daerah dalam membangun kapasitas manajemen fiskal. Artinya, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan besar namun kapasitas pengelolaan yang terbatas tetap akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan kemandirian keuangan.

Dalam konteks Kabupaten Jayapura, penurunan efektivitas PAD menunjukkan perlunya evaluasi terhadap mekanisme pemungutan pendapatan daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan ulang terhadap potensi penerimaan, memperbaiki sistem pendataan wajib pajak daerah, serta meningkatkan integrasi antara perencanaan pembangunan dan strategi peningkatan pendapatan.

Efisiensi Keuangan Daerah dan Kualitas Pengelolaan Anggaran Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan Kabupaten Jayapura selama periode 2015–2024 relatif berada pada kategori efisien, meskipun terjadi peningkatan rasio pada beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara umum mampu menjaga keseimbangan antara realisasi belanja dan pendapatan daerah.

Namun demikian, tingkat efisiensi yang semakin mendekati batas tinggi perlu menjadi perhatian karena menunjukkan meningkatnya tekanan fiskal daerah. Ketika pertumbuhan

belanja lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan, ruang fiskal pemerintah daerah akan semakin terbatas untuk membiayai program pembangunan strategis.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Bisogno et al. (2019) yang menekankan bahwa efisiensi keuangan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengurangi pengeluaran, tetapi juga oleh kualitas proses perencanaan, transparansi anggaran, dan kemampuan pemerintah menghasilkan manfaat publik dari setiap penggunaan anggaran.

Lebih lanjut, Lewis (2017) menemukan bahwa peningkatan sumber daya fiskal daerah di Indonesia tidak selalu menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik karena sebagian anggaran masih dialokasikan untuk kebutuhan administratif dibandingkan program pembangunan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Jayapura, efisiensi keuangan perlu diarahkan bukan hanya pada pengendalian jumlah belanja, tetapi juga pada peningkatan kualitas belanja. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap peningkatan pengeluaran memberikan kontribusi terhadap peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar, dan produktivitas ekonomi masyarakat.

Struktur Belanja Daerah: Dominasi Belanja Operasi dan Keterbatasan Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur belanja Kabupaten Jayapura selama periode penelitian masih didominasi oleh belanja operasi, sementara proporsi belanja modal relatif lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin pemerintahan dibandingkan investasi pembangunan jangka panjang.

Dominasi belanja operasi sebenarnya merupakan fenomena yang umum terjadi pada pemerintah daerah karena adanya kebutuhan pembiayaan aparatur, pelayanan administratif, dan operasional pemerintahan. Namun, apabila proporsi belanja rutin terlalu besar secara terus-menerus, maka kemampuan daerah dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas publik dapat menjadi terbatas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sugiyarto et al. (2025) yang menunjukkan bahwa kualitas pengeluaran publik menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dengan komposisi belanja yang lebih produktif cenderung memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

Selain itu, penelitian Lewis (2017) menunjukkan bahwa besarnya sumber daya fiskal tidak selalu menghasilkan peningkatan pembangunan apabila pemerintah daerah tidak mampu mengarahkan belanja pada sektor yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang.

Dalam konteks Kabupaten Jayapura, rendahnya proporsi belanja modal pada tahun-tahun terakhir menunjukkan perlunya evaluasi terhadap prioritas pengeluaran daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan belanja agar terdapat keseimbangan antara kebutuhan operasional pemerintahan dan investasi pembangunan.

Pertumbuhan PAD dan Keberlanjutan Kapasitas Fiskal Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Kabupaten Jayapura selama periode 2015-2024 mengalami pola yang berfluktuasi. Pertumbuhan positif terjadi pada beberapa tahun tertentu, terutama pada tahun 2021 dan 2022, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024.

Fluktuasi pertumbuhan PAD menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pendapatan daerah belum berlangsung secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD masih dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun perubahan kondisi ekonomi daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Akita et al. (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah di Indonesia membutuhkan strategi jangka panjang karena

sebagian besar daerah masih menghadapi keterbatasan basis ekonomi dan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

Dalam perspektif keberlanjutan fiskal, pertumbuhan PAD tidak hanya dilihat dari peningkatan nominal penerimaan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah menciptakan sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Jayapura perlu mendorong diversifikasi ekonomi lokal, penguatan sektor unggulan daerah, serta peningkatan kualitas tata kelola pendapatan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Jayapura selama periode 2015–2024 masih menghadapi tantangan utama berupa rendahnya kemandirian fiskal, efektivitas PAD yang belum stabil, serta dominasi belanja rutin. Namun demikian, terdapat peluang peningkatan melalui reformasi pengelolaan pendapatan dan peningkatan kualitas belanja publik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura periode 2015–2024, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan daerah masih menghadapi tantangan dalam mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah dengan dominasi ketergantungan terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat. Selain itu, efektivitas PAD menunjukkan pola yang berfluktuasi dan cenderung menurun pada akhir periode penelitian, sementara pertumbuhan PAD belum menunjukkan tren yang stabil. Dari sisi pengelolaan anggaran, pemerintah daerah mampu menjaga efisiensi keuangan, tetapi struktur belanja masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan belanja modal yang bersifat produktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja masih menjadi aspek penting dalam memperbaiki kinerja keuangan Kabupaten Jayapura.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan potensi ekonomi lokal, serta modernisasi sistem administrasi pendapatan berbasis digital. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap struktur belanja dengan meningkatkan proporsi belanja modal yang mendukung pembangunan jangka panjang, tanpa mengabaikan kebutuhan operasional pemerintahan. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan, penyusunan target PAD yang lebih realistis, serta pengembangan iklim investasi daerah menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dan menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih mandiri, efektif, dan berkelanjutan.

Referensi :

- Akita, T., Riadi, A. A., & Rizal, A. (2021). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era: Does general allocation fund equalize fiscal revenues? *Regional Science Policy & Practice*, 13(6), 1842–1865. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12326>
- Andrews, R., & Entwistle, T. (2014). *Public service efficiency: Reframing the debate*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315885478>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., Santis, S., & Citro, F. (2019). Budgetary transparency and financial sustainability in local governments: A comparative analysis. *International Journal of Public Administration*, 42(9), 720–732. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1506930>
- Bovaird, T., & Löffler, E. (2015). *Public management and governance* (3rd ed.). Routledge.
- Cahyaningsih, A., & Fitradhy, A. (2019). The impact of asymmetric fiscal decentralization on education and health outcomes: Evidence from Papua Province, Indonesia. *Economics & Sociology*, 12(2), 48–63. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-2/3>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, R. (2016). Pemanfaatan data sekunder dalam penelitian sosial dan ekonomi. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan*, 1(2), 45–54.
- Irnowati, I., Nur, M., & Hasanuddin, H. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 1–10.
- Lewis, B. D. (2017). Local government spending and service delivery in Indonesia: The perverse effects of substantial fiscal resources. *Regional Studies*, 51(11), 1695–1707. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1216957>
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>
- Lewis, B. D., & Smoke, P. (2017). Intergovernmental fiscal transfers and local incentives and responses: The case of Indonesia. *Fiscal Studies*, 38(1), 111–139. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12080>
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Martono, N. (2012). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis isi dan analisis data sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, S. (2024). Exploring fiscal decentralization in Indonesia: The impact of special autonomy funds on the economies of Aceh, Papua, and West Papua. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 9(1), 118–135. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v9i1.4193>
- Saptono, P. B., & Mahmud, G. (2023). Stimulus or enforcement? How intergovernmental transfers crowd-in local taxes in Indonesia. *Public Finance Review*, 51(6), 782–837. <https://doi.org/10.1177/10911421231191961>
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research methods for business students* (8th ed.). Pearson.
- Schick, A. (1998). Why most developing countries should not try New Zealand reforms. *The World Bank Research Observer*, 13(1), 123–131. <https://doi.org/10.1093/wbro/13.1.123>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). Wiley.
- Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development*, 35(2), 97–112. <https://doi.org/10.1002/pad.1703>
- Sofilda, E., Hamzah, M. Z., & Kusairi, S. (2023). Analysis of fiscal decentralisation, human development, and regional economic growth in Indonesia. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), Article 2220520. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2220520>
- Sugiyarto, A., Lee, B. L., & Wilson, C. (2025). Narrowing the gap: Dynamics of Indonesia's public expenditure performance in economically lagging districts. *Economic Analysis and Policy*, 85, 2299–2318. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2025.03.014>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Talitha, T., Firman, T., & Hudalah, D. (2020). Welcoming two decades of decentralization in Indonesia: A regional development perspective. *Territory, Politics, Governance*, 8(5), 690–708. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595>
- Tumija, T., Lestari, A., & Hidayat, R. (2022). Analisis rasio keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(2), 145–157.
- Vianita, I., Putri, R. A., & Nugroho, A. (2024). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 19(1), 45–58.